

ABSTRACT

In a country, the Constitution works as a form of the most essential foundation of national law, which embraces all of types of legitimate law construction thereafter. Normally, the Constitution is a reflection of national identity. However, this circumstance does not apply to Japan. The Constitution encompassed by Japan, is a result of the World War history. Constitution 1947 is the successor of Meiji Constitution that is completely constructed by foreign intervention, namely the United States as the leading Allies Power.

Obviously, Constitution 1947 presents a lot of debates since its enactment, particularly the debate on Article 9, which is reflecting Japan's commitment to the renunciation of war. Through the time, main discussion over the Constitution is always about the idea of amendment. The idea of Constitutional amendment once again warms up due to decisions and political movements by Shinzo Abe in reviving his (and his party) main political interest, amending the Constitution.

This undergraduate thesis would specifically analyse the discussion of Article 9 and its significance towards the Constitutional amendment in the second period of Shinzo Abe Administration. Therefore, the focus of the research would be relied on the position of Shinzo Abe as the major decision-maker of political issue, in this context, Constitutional amendment. The research would be examined through the framework of constructivism. The involvement of the state-actors would be determined on the perspective of domestic and international political players, such as ruling parties, media, public opinion, major allies, and surrounding neighbourhood.

Keyword: Constitution 1947, Article 9, Renunciation of War, Shinzo Abe, Japan's foreign policy, Self Defence Forces, Collective Self Defence, United States, Military Alliance.

Word count: 14,890

ABSTRAKSI

Di dalam sebuah negara, Konstitusi merupakan landasan hukum yang paling mendasar, yang melingkupi penciptaan bentuk-bentuk hukum yang sah setelahnya. Umumnya, Konstitusi merupakan refleksi dari identitas nasional dari negaranya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Jepang. Konstitusi yang dianut Jepang, merupakan sebuah hasil dari sejarah Perang Dunia. Konstitusi 1947 adalah pengganti dari Konstitusi Meiji yang secara seluruhnya dibentuk oleh campur tangan asing, yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin kekuatan dari kubu Aliansi.

Jelas, Konstitusi 1947 membawa banyak sekali perdebatan setelah diberlakukannya, terutama perdebatan mengenai Artikel 9 yang merefleksikan tentang komitmen Jepang terhadap penolakan tindak peperangan. Seiring dengan berjalannya waktu, perbincangan mengenai Konstitusi 1947 selalu berkutat tentang sebuah ide amendement. Wacana amandemen dari Konstitusi 1947 sekali lagi menghangat, dipicu oleh keputusan dan tindakan dalam konteks politik oleh Shinzo Abe di dalam realisasinya menjalankan tujuan atau ideologi politik dari Shinzo Abe (dan partainya), yaitu melakukan amandemen konstitusi.

Skripsi ini akan secara spesifik membahas tentang Artikel 9 dan signifikansinya terhadap wacana amandemen pada masa pemerintahan kedua Perdana Menteri Shinzo Abe. Kemudian, riset dari skripsi ini akan difokuskan kepada posisi Shinzo Abe sebagai penentu keputusan paling tinggi didalam konteks politik dan kaitanya terhadap wacana amandemen konstitusi. Riset akan dikerjakan berdasar pada teori konstruktivisme. Dan, peran serta actor kenegaraan akan diperoleh dari perspektif domestic dan internasional, yaitu partai-partai yang berkuasa, media, opini public, mitra aliansi, dan negara-negara tetangga.

Kata Kunci: Konstitusi 1947, Artikel 9, Penolakan terhadap Perang, Shinzo Abe, Kebijakan Luar Negeri Jepang, *Self Defence Forces*, *Collective Self Defence*, Amerika Serikat, Aliansi Militer.

Jumlah Kata: 14,890